

Menurut Nimmo, citra adalah segala hal yang berkaitan dengan situasi keseharian seseorang; menyangkut pengetahuan, perasaan dan kecenderungannya terhadap sesuatu. Sehingga citra dapat berubah seiring dengan perjalanan waktu. Teori image building menyebutkan bahwa, citra akan terlihat atau terbentuk melalui proses penerimaan secara fisik (panca indra), masuk ke saringan perhatian (attention filter), dan dari situ menghasilkan pesan yang dapat dilihat dan dimengerti (perceived message), yang kemudian berubah menjadi persepsi dan akhirnya membentuk citra.⁶

Lebih jauh, Nimmo menyebutkan bahwa, citra seseorang tentang politik yang terjalin melalui pikiran, perasaan dan kesucian subjektif akan memberi kepuasan baginya, yang paling tidak memiliki tiga kegunaan, yaitu: pertama, Betapapun benar atau salah, lengkap atau tidak lengkap, pengetahuan orang tentang politik, memberi jalan pada seseorang untuk memahami sebuah peristiwa politik tertentu. Kedua, Kesukaan dan ketidaksukaan umum pada citra seseorang tentang politik menyajikan dasar untuk menilai objek politik. Ketiga, Citra diri seseorang memberikan cara menghubungkan dirinya dengan orang lain. Sebagai bagian dari komunikasi politik, pencitraan politik memang dilakukan secara persuasif untuk memperluas arsiran wilayah harapan antara kandidat dengan pemilih. Corner dan Pels mencatat baik figur-figur yang bersih maupun bermasalah (notorious) sama-sama secara substansial bekerja keras membangun citra

⁶ <http://christwinata.blogspot.co.id/2015/10/strategi-membangun-citra-perusahaan.html>. (diakses hari Selasa, tanggal 25 Juli 2017, jam 12:30).

pemilih. Dengan demikian citra adalah transaksi antara strategi seorang kandidat dalam menciptakan kesan personal dengan kepercayaan yang sudah ada dalam benak para pemilih.

Menurut McGinnis, pemilih sesungguhnya melihat kandidat bukan berdasarkan realitas yang asli melainkan dari sebuah proses kimiawi antara pemilih dan citra kandidat (gambaran imajiner). Citra yang baik, dengan sendirinya akan meningkatkan popularitas dan elektabilitas kandidat, begitupun sebaliknya. Sehingga, tidak salah bila politisi “jumpalitan” melakukan pencitraan politik. Karena semakin dapat menampilkan citra yang baik, maka peluang untuk meraup dukungan pemilih semakin besar. Namun dalam konteks pembentukan citra, tidak sedikit yang kehilangan kekuatan penarik perhatian (*eye catching*). Citra yang sebelumnya diharapkan mampu menciptakan kejutan, stimulasi, dan gebrakan informasi tak terduga (*entropy*) berubah menjadi pengulangan-pengulangan yang terduga (*redundancy*). Citra-citra berestetika dan berselera tinggi, karena kehabisan perbendaharaan tanda, pada akhirnya menjadi citra-citra yang murahan dan dangkal. Dalam konteks komunikasi politik, hal ini berlangsung saat citra-citra politik tampil dalam jumlah banyak, frekuensi tinggi, dan waktu cepat sehingga menyebabkan pesan yang disampaikan tidak lagi menarik perhatian publik.

Definisi pencitraan sendiri ialah gambaran yang dimiliki orang banyak mengenai pribadi, perusahaan, organisasi atau produk. Sedangkan Indikator dari pencitraan sendiri ialah memiliki kredibilitas tinggi dalam memimpin,

namun, „merek pribadi“ anda akan selalu diingat orang lain. Konsistensi merupakan prasyarat utama dari personal branding yang kuat. Hal-hal yang tidak konsisten akan melemahkan personal branding anda, dimana pada akhirnya akan menghilangkan kepercayaan serta ingatan orang lain terhadap diri anda (McNally & Speak, 2002: 13).

Personal Branding adalah sesuatu tentang bagaimana mengambil kendali atas penilaian orang lain terhadap anda sebelum ada pertemuan langsung dengan anda. (Montoya & Vandehey, 2008).

“Personal Branding is about taking control of how other people perceive you before they come into direct contact with you.” (Montoya & Vandehey, 2008).

Menurut (Sandy Wahyudi, MM, MA., dosen Entrepreneur Universitas Ciputra) ada beberapa alasan mengapa sangat penting untuk sebuah profesional memiliki personal branding :

1. Dunia bisnis menjadi semakin kompetitif dan dampak globalisasi semakin terasa, semua orang berlomba untuk mendapatkan pelanggan yang sama.
2. Hubungan baik dengan pelanggan yang akan menentukan penjualan, bukan lagi kualitas atau harga produk yang kita jual.
3. Personal branding akan menjadi titik awal (tipping point) yang ada dalam pikiran pelanggan saat mengevaluasi produk atau jasa yang kita jual.

memperoleh kekuasaan. Pemilihan Umum, Pilpres, serta Pemilu lokal dan kepopuleran seseorang calon atau kontestan sangat mendominasi dan menentukan bagi pilihan ditentukan oleh rakyat.

Menurut Nimmo, dengan adanya modal popularitas maka akan lebih mudah bagi seseorang atau figur tersebut untuk mencuri perhatian masyarakat, melalui pemberitaan media yang diharapkan nantinya akan mempunyai nilai tambah untuk meningkatkan atau mendongkrak elektabilitas. Untuk mewujudkan semua itu, perlu dibangun pencitraan yang baik ditengah masyarakat, agar nantinya timbul simpati dan keberpihakan masyarakat kepada tokoh atau figur tersebut.

Kepragmatisan dunia politik membuat prinsip serba instan dan cepat menjadi prinsip utama. Semuanya dikarbit. Calon dan partai baru diorbitkan untuk menjadi cepat terkenal dan populer di kalangan masyarakat dan media massa. Popularitas dijadikan tolok ukur utama suatu keberhasilan. Orang yang berkualitas tetapi tidak dalam lingkaran kekuasaan pun menjadi tersisih. Sebaliknya, mereka yang berada dalam posisi pusat perhatian media massa, seperti penyanyi, pelawak, artis sinetron, dan pengamat, menjadi rebutan partai-partai politik. Semakin besar jumlah penggemar semakin tinggi nilai jual selebritis bersangkutan.

Politik 'kacang-goreng' adalah politik instan dan tanpa pembekalan. Asal mereka terkenal dan kagum sudah cukup menjadi sumber daya untuk terjun ke dunia politik. Alhasil, popularitas dan ketenaran menjadi syarat nomor satu. Sulit ditemukan kaderisasi yang terpadu dan terencana di dalam

Bu Risma yang alumni Teknik Arsitektur ITS ini terbukti berhasil menjadi kepala DKP. Hal ini ditunjukkan sejak dipegang oleh beliau Surabaya menjadi kota yang lebih bersih, adem dan hijau. Hal ini membuat beliau memiliki track record baik untuk dicalonkan menjadi Walikota. Namun sebenarnya Bu Risma enggan dicalonkan karena menurut beliau pertanggungjawabannya luar biasa berat di akhirat kelak.

Mulai 28 September 2010 Bu Tri Rismaharini resmi mejabat sebagai Walikota Surabaya. Sejak saat itu sepak terjang dari Bu Risma semakin kelihatan. Tri Rismaharini merupakan Wali Kota Surabaya wanita pertama yang menjabat untuk periode 2010-2015. Di bawah kepemimpinannya sebagai Kepala DKP hingga wali kota saat ini, Surabaya menjadi kota yang bersih dan asri. Yang paling menonjol adalah pengelolaan pertamanan Surabaya yang lebih baik lagi sebagai contoh adalah Taman Bungkul yang awalnya tak pantas disebut taman disulap oleh Bu Risma menjadi taman yang indah dan menjadi tempat rekreasi gratis untuk warga Surabaya.

Wanita yang akrab disapa dengan nama Risma ini berada di bawah naungan Partai Demokrat Indonesia Perjuangan (PDIP). Ia terkenal sebagai sosok wanita yang tegas dan tak kenal kompromi dalam menjalankan tugasnya.

Wanita kelahiran 20 November 1961 ini menjadi salah satu nominasi wali kota terbaik di dunia, 2012 World Mayor Prize, yang digelar oleh The City Mayors Foundation. Ia terpilih karena segudang prestasi yang sudah ia torehkan selama menjabat sebagai Wali Kota Surabaya. Ia dinilai berhasil menata kota Surabaya menjadi kota yang bersih dan penuh taman. Salah satu buktinya adalah

Jadi yang dimaksud dengan peta kemenangan PDIP dalam penelitian ini adalah gambaran tentang keberhasilan PDIP dalam meraih target optimal yang diharapkan. Keberhasilan atau kemenangan yang dimaksud disebabkan karena PDIP sendiri atau karena figur Bu Risma.

Kemenangan adalah keberhasilan meraih target optimal yang diharapkan. Kemenangan ditentukan oleh hasil akhir. Kemenangan dalam pilpres, misalnya, tak bisa dilepaskan dari hasil akhir perhitungan suara. Karena itu, dalam kompetisi politik, nasihat bijak “kekalahan adalah kemenangan yang tertunda” kerap terasa konyol. Sebab kekalahan dalam politik berarti “habis modal”. Apalagi dalam kompetisi politik yang mengutamakan kapitalisasi modal untuk menggalang kemenangan. Demi meraih hasil akhir kemenangan itulah, berbagai cara ditempuh, bila perlu menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan, seperti dogma Niccolo Machiavelli.

Tapi kemenangan, sesungguhnya, tak melulu soal hasil. Ada dimensi etis yang sesungguhnya inheren dan tak bisa diabaikan begitu saja dalam proses dan perjuangan mencapai kemenangan. Itulah sebabnya “bagaimana meraih kemenangan” menjadi hal yang menentukan kualitas suatu kemenangan. Dimensi etis dalam kemenangan membuat kita menghargai proses, sebagai bagian dari pergulatan mencapai kualitas keluhuran manusia. Sebab bila dimensi etis itu hilang, maka kemenangan sebagai upaya meraih tingkat keluhuran, bisa menjadi sesuatu yang merusak tatanan nilai.

Ada ‘kemenangan faktual’, dimana ukuran kemenangan didasarkan pada fakta, data, peraturan/perundangan yang menjadi acuan ditetapkan. Berdasarkan

fakta, kemenangan menjadi tak terbantahkan. Semisal, dalam Piala Dunia 2014 kesebelasan Jerman mengalahkan Brasil 7-1. Siapa pun, baik individu atau media, tak bisa membantah fakta itu. Kecuali bila ada televisi, misalnya, “yang memang beda” lalu memanipulasi fakta itu menjadi kemenangan Brasil.

Karena kemenangan faktual bisa dimanipulasi, maka ada hal yang tak boleh dilupakan, yakni hal yang substansial dalam kemenangan. Inilah yang sering disebut dengan ‘kemenangan substansial’, dimana proses dan cara bagaimana kemenangan diperjuangkan mendapat apresiasi, karena dimensi etis yang dicapainya. Kesebelasan Belanda dikenal sebagai “juara tanpa mahkota” karena total football-nya yang indah. Ada substansi yang membuat perjuangan meraih kemenangan menjadi berharga, bahkan terkadang, mendapatkan apresiasi tinggi kemenangan faktual yang diraih tidak dengan cara-cara elegan.

Ketika yang faktual dan substansial menjadi hal yang tak terpisahkan, itulah ‘kemenangan ideal’. Fair play, sebagaimana dalam sepakbola, adalah manifestasi keinginan mencapai yang ideal itu. Dimensi etis itu memprasyaratkan bahwa yang substansial tak bisa dipisahkan dari perkara teknis dan prosedural untuk mencapai kemenangan.

Dimensi etis juga membuat kemenangan sering dipandang sebagai sesuatu yang tak bisa dilepaskan dari yang transendental, sebagaimana banyak diutamakan dalam implementasi keimanan; seperti makna puasa sebagai upaya “meraih kemenangan” yang merupakan proses kesadaran yang bersifat transendental. Dalam ‘kemenangan transendental’ ada proses pencarian yang bukan lagi untuk semata-mata pembuktian kemenangan diri, tetapi pencapaian

melanggengkan jabatannya dan harus menyerahkan kursi kepresidenan kepada pimpinan Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

Pada pemilihan legislatif tahun 2014 kemarin PDIP memperoleh kursi paling banyak dari para pesaing-pesaing di pemilu legislatif tahun 2014. Dengan perolehan kursi yang paling banyak ini, PDIP dinobatkan sebagai pemenang dalam pemilihan legislatif tingkat nasional pada tahun 2014. Kemenangan PDIP di tingkat DPR RI juga diikuti oleh PDIP tingkat kabupaten/kota, lebih tepatnya di kota Surabaya. di kota Surabaya ini PDIP juga memperoleh kursi yang paling banyak dengan para pesaing-pesaingnya di pemilu legislatif di tingkat kabupaten/kota tahun 2014.

4. Pemilihan Legislatif

Indonesia merupakan negara yang menjunjung demokrasi sehingga dalam menentukan pemerintah baik itu anggota legislatif ataupun Presiden akan lewat cara Pemilihan Umum dan Pemilihan Legislatif. Pemilihan legislatif adalah pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang nantinya akan bertugas menjadi anggota lembaga legislatif. Pemilihan legislatif diadakan setiap 5 tahun sekali.

Pemilihan legislatif sendiri di Indonesia telah dilakukan sebanyak 3 kali yaitu pada tahun 1999, 2004, 2009 dan yang keempat terjadi pada tahun 2014 dan pemilihan ini akan memutuskan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),

Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) akan dipilih di 34 provinsi yang setiap provinsi akan mempunyai 35-100 anggota, jumlah anggota disesuaikan dengan berapa banyak penduduk yang ada di provinsi tersebut.

Tentunya dalam memilih anggota DPR, DPD, DPRD dalam pemilu legislatif kalian harus memilih calon anggota legislatif yang memenuhi kriteria pemimpin yang baik agar negara Indonesia dipimpin oleh orang-orang yang memang benar mau memajukan bangsa Indonesia.

Negara Indonesia dalam pemilihan legislatif memakai sistem multi partai. Undang-undang 8/2012 tentang pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota. mewajibkan masing-masing partai politik mengikuti proses pendaftaran yang mana nanti akan diverifikasi oleh KPU bila ingin mengikuti pemilihan umum.

Penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia termasuk pemilihan legislatif baik itu bersifat nasional merupakan tanggung jawab dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang telah diatur dalam Undang-undang NO 15/2011. Selain Komisi Pemilihan Umum (KPU) lembaga yang bertanggung jawab akan berlangsungnya pemilihan umum adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga yang mempunyai tugas untuk mengawasi Pemilu termasuk Pemilihan Legislatif agar berjalan dengan benar. Selain KPU dan Bawaslu, ada pula lembaga yang dikenal dengan nama Dewan Kerhormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). DKPP mempunyai tugas

untuk memeriksa gugatan atau laporan atas tuduhan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU atau Bawaslu.

5. Ex post Facto

Penelitian ex post facto merupakan penelitian yang bertujuan menemukan penyebab yang memungkinkan perubahan perilaku, gejala atau fenomena yang disebabkan oleh suatu peristiwa, perilaku atau hal-hal yang menyebabkan perubahan pada variable bebas yang secara keseluruhan sudah terjadi. Penelitian ex post facto secara metodologis merupakan penelitian eksperimen yang juga menguji hipotesis tetapi tidak memberikan perlakuan-perlakuan tertentu karena sesuatu sebab kurang etis untuk memberikan perlakuan atau memberikan manipulasi. Biasanya karena alasan etika manusiawi, atau gejala/peristiwa tersebut sudah terjadi dan ingin menelusuri faktor-faktor penyebabnya atau hal-hal yang mempengaruhinya.

Definisi ex post facto adalah sesudah fakta, yaitu penelitian yang dilakukan setelah suatu kejadian itu terjadi. Penelitian ex post facto bertujuan menemukan penyebab yang memungkinkan perubahan perilaku, gejala atau fenomena yang disebabkan oleh suatu peristiwa, perilaku, gejala atau fenomena yang disebabkan oleh suatu peristiwa, perilaku atau hal-hal yang menyebabkan perubahan pada variabel bebas secara keseluruhan sudah terjadi. Sebagai contoh, pengaruh peredaran minuman keras terhadap tingkat kenakalan remaja. Dalam hal ini peneliti tidak mungkin melakukan eksperimen karena ia tidak mungkin memanipulasi kondisi subjek (membuat agar para pedagang warung kelontong

